

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Diantara banyaknya masalah yang dihadapi oleh Negara Indonesia yakni masalah kemiskinan. Di mana kemiskinan dan kesejahteraan sosial berjalan saling beriringan tidak bisa dipisahkan. Masalah kemiskinan yakni masalah sosial yang kompleks yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari banyak orang, yang merupakan hambatan yang berat untuk ditangani dalam konteks pembangunan internasional. Secara teori, kemiskinan yakni ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seseorang, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. (Kuncoro dalam Permana& Arianti, 2012).

Kemiskinan dapat digolongkan dalam beberapa dimensi yaitu dimensi ekonomi yang berkontribusi terhadap kemiskinan termasuk kekurangan uang untuk kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, dimensi struktural dan politik meliputi kurangnya akses ke sumber daya politik, dan dimensi sosial dan budaya meliputi kemiskinan lokal, kurangnya dukungan masyarakat, pandangan yang fatalistis, dan kurangnya keterampilan dan pendidikan (Amalia *et al*, 2015).

Kemiskinan juga terjadi apabila dalam diri seseorang terdapat sikap yang pasrah dengan keadaan serta tidak memperdulikan lingkungannya, dan kemiskinan juga terjadi karena ketidakmampuan mendapat pekerjaan atau rendahnya pendidikan dan kesehatan yang diperoleh dari masyarakat kurang mampu. Menjadi miskin berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seseorang untuk bertahan hidup. Masalah kemiskinan yakni perlu ditangani dengan hati-hati agar bisa dikurangi salah satu

penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah adalah pemerataan pembangunan, akan tetapi pemerataan pembangunan saja kurang cukup karena kemiskinan tetap menjadi isu yang berkelanjutan setiap tahunnya (Arifin dalam Ulfah, 2018).

Masalah kemiskinan tidak hanya negara berkembang bahkan Negara dunia sudah mengalami yang namanya kemiskinan. Sehingga Negara dunia memperingati tahun internasional pembasmian kemiskinan untuk mengurangi kericuhan dan kendala pembangunan setiap tanggal 17 oktober, gerakan ini membantu menarik simpati dunia atas masalah kemiskinan serta memperlihatkan tindakan pragmatis oleh berbagai pengelola kepentingan dunia diantaranya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui deklarasi PBB memberikan tantangan bagi dunia. Hebatnya, seluruh dunia dalam 20 tahun tingkat kemiskinan berkurang setengahnya menjadi 43 % tahun 1990 menjadi 21% tahun 2010, di mana tingkat kemiskinan yang luas telah membuat perbedaan yang signifikan sebagian besar Negara. Pengentasan kemiskinan mengalami penurunan contohnya negara Cina di mana 77% penduduk Cina hidup dibawah kurang dari satu *USD* per hari tahun 1980 turun secara signifikan menjadi 14 % tahun 2008. Ini semua belum berakhir walaupun mengalami penurunan yang luar biasa dunia masih menghadapi ancaman besar seperti ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan (Adekoya, 2018).

Menurut *Cable News Network Indonesia*, inilah 100 negara miskin di dunia, termasuk Indonesia, yang diukur dengan PDB (produk domestik bruto) dan paritas daya beli (PPP). Indonesia adalah negara miskin ke-73 di dunia menurut *World Population Review*. Pada tahun 2020, PNB per kapita Republik Indonesia adalah \$3.870. Sedangkan menurut *gfmag.com*, Indonesia akan menjadi negara miskin ke-91 di dunia pada tahun 2022. Dengan PDB Indonesia dan paritas daya beli sebesar \$14.535 di antara semua negara Asia Tenggara, posisi Indonesia dapat dikatakan lebih baik. Lebih dari 100 negara digolongkan sebagai negara miskin, termasuk Vietnam di urutan ke-82, Filipina di urutan ke-72, Kamboja di urutan ke-46, Myanmar di urutan

ke-45, dan Timor Timur di urutan ke-29. Dengan ukuran baru tersebut, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari \$1,9 menjadi \$2,15 per kapita per hari. Dengan asumsi kurs Rp 15.216 per dolar AS, garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia adalah Rp 32.812 per orang per hari, atau Rp 984.360 per orang per bulan. Garis kemiskinan dihitung dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM). Garis kemiskinan yang digunakan BPS pada Maret 2022 adalah Rp 505.469,00 per kapita per bulan, komposisi GKM Rp374.455,00 (74,08 persen) dan GKNM Rp131.014,00 (25,92 persen). Pernyataan ini merupakan perbandingan dan definisi kemiskinan di Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

Jika dilihat dari tingkat kemiskinan Provinsi Indonesia, Provinsi Istimewa Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang tinggi dibanding dengan provinsi lain yang ada di pulau Jawa. Sehingga, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki tugas untuk mencari solusi penanggulangan angka kemiskinan yang cukup tinggi di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Pada tahun 2010-2020 yaitu tahun dimana daerah Yogyakarta memiliki persentase penduduk miskin relatif tinggi dikarenakan adanya covid-19 sehingga memunculkan permasalahan di antaranya masalah pengangguran, pangan, penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial lainnya. Akibatnya tingkat kesejahteraan sosial daerah tersebut mengalami penurunan.

Badan Pusat Statistik menyatakan rata-rata penduduk miskin di enam Provinsi Pulau Jawa tahun 2010 – 2020 yakni daerah Yogyakarta dengan rata-rata kemiskinan 12,5 %, Jawa tengah 11,91 %, Jawa timur 8,38 %, Jawa barat 7,97 %, Banten 4,67 %, dan DKI Jakarta 3,76 %. Berdasarkan persentase tersebut, Provinsi Yogyakarta memiliki angka kemiskinan tertinggi dari kelima Provinsi yang berada Pulau Jawa. Berdasarkan Laporan Badan Perencanaan dan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan daerah Istimewa Yogyakarta terjadi karena covid-19 sehingga berakibat pada sumber daya terbatas, keterbatasan lahan akibat jumlah penduduk meningkat, dan sempitnya

kesempatan kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Sehingga, mengakibatkan pendapatan buruk yang memiliki efek domino pada tabungan dan investasi yang rendah, yang pada gilirannya bisa menyebabkan keterbelakangan dan ketertinggalan (Pitriyani *et al*, 2022).

Daerah yang menyangang keterbelakangan rentan dengan tingginya jumlah penduduk miskin. Pengembangan Sumber daya manusia (SDM) harus didukung dan diperhatikan pada daerah tersebut. Karena pengembangan SDM bisa dibantu dengan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas tinggi. Menurut Todaro (2006) SDM yang berkualitas bisa memberikan pengaruh yang luas dan mendorong terbentuknya pembangunan suatu daerah terutama dalam pembangunan ekonomi, maka peningkatan SDM berupa pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama termasuk hal yang vital bagi pembangunan (Ilham, 2019).

Sumber daya manusia yang baik dipengaruhi dengan *human capital*. Istilah *human capital* ditemukan oleh seorang ekonom yakni *theodore Schultz* (1960-an). *Theodore* percaya bahwa *human capital* seperti pengetahuan, keterampilan dan kesehatan bisa diinvestasikan melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas dan tingkat produksi. Dimana *human capital* tersebut merupakan kesinambungan dalam diri manusia yang bertahan lama, seperti mesin, pabrik, atau pabrik bertahan (*Becker* dalam D.adekoya, 2018).

Pembangunan *human capital* menjadi elemen inti dalam upaya pengentasan kemiskinan karena variabel *human capital* memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Menurut *Olatunji D Adekoya* (2018) dalam penelitian dampak pengembangan *human capital* terhadap pengentasan kemiskinan di Nigeria melaporkan adanya korelasi jangka panjang yang positif antara pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan tingkat partisipasi sekolah pada pendapatan per kapita Nigeria, korelasi yang negatif terdapat di antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, angka kematian bayi, harapan hidup, dan melek huruf pada pendapatan

per kapita Nigeria. Menurut Jojo *et al*, (2019) Mempublikasikan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan GDP penduduk Indonesia. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan GDP penduduk Indonesia. Angka melek huruf memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap GDP penduduk Indonesia. Menurut laporan Fauzan Fikri (2017), perekonomian Provinsi Jawa Timur diuntungkan atau berpengaruh positif oleh tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja wilayah tersebut.

Dari ketiga penelitian ini memiliki hasil yang berbeda karena memiliki variabel dependen yang berbeda. Sehingga dari permasalahan ini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai dampak pembangunan *human capital* terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pentingnya pembangunan *human capital* yang harus dimiliki seseorang seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan dengan variabel dependent dan independent (Tingkat kemiskinan, produk domestik regional bruto, populasi, investasi riil, rata-rata lama sekolah, listrik yang didistribusikan (gwh), panjang jalan, tingkat keterbukaan, konsumsi pemerintah) sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah ini. Jadi, yang membedakan penelitian ini dari yang lain yakni dari sisi deret waktu yang digunakan tahun 2010-2021, variabel dependen yang berbeda, dan Negara yang diteliti berbeda. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti **“Dampak Pembangunan *Human Capital* Terhadap Kemiskinan di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian diatas, di rumuskanlah masalah penelitian yakni:

1.2.1 Bagaimana dampak pembangunan *human capital* terhadap kemiskinan di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yakni :

1.3.1 Untuk mengetahui dampak pembangunan *human capital* terhadap kemiskinan di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dimaksud bisa berguna bagi beberapa pihak, adapun manfaat dilakukannya penelitian yakni.

1.4.1 Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan di bidang Ekonomi, khususnya dalam hal kajian evaluasi pembangunan *human capital* untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.4.2 Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah Indonesia bisa berkontribusi dalam pengembangan SDM dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan memperhatikan *human capital* berupa pendidikan dan pembangunan yang merata.

1.4.3 Bagi pembaca, sehingga bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk memberikan wawasan atau pemahaman tentang pembangunan *human capital* untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.4.4 Bagi peneliti lain agar bisa dimanfaatkan sebagai masukan atau referensi, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, dan sebagai sumber pembandingan dalam penelitian dengan tema yang sama.